

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEWASPADAAN DINI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
Substansi Surveilans

Mengapa perlu sistem kewaspadaan
dini ?

KOMITMEN GLOBAL

DALAM MENYIKAPI MENINGKATNYA ANCAMAN KKM

International Health Regulation (2005)

8 CORE CAPACITIES

- Kebijakan dan Legislasi
- Koordinasi
- Surveillance
- Respon
- Kesiapsiagaan
- Komunikasi Risiko
- SDM
- Laboratorium

BAHAYA POTENSIAL

- Biological
 - Infectious
 - Zoonosis
 - Food safety
- Chemical
- Radio nuclear

- Detect
- Prevent
- Respond

Global Health Security Agenda

Percepatan Implementasi

11 ACTION PACKAGES

- Antimicrobial Resistance
- Emerging Zoonotic Diseases
- National Biosafety & Biosecurity Systems
- Immunization
- National Laboratory Systems
- Real-time Biosurveillance
- Rapid Reporting
- Workforce
- Emergency Operations Centers
- Linking Public Health with Law and Multisectoral Rapid Response
- Medical Countermeasures and Personnel Deployment

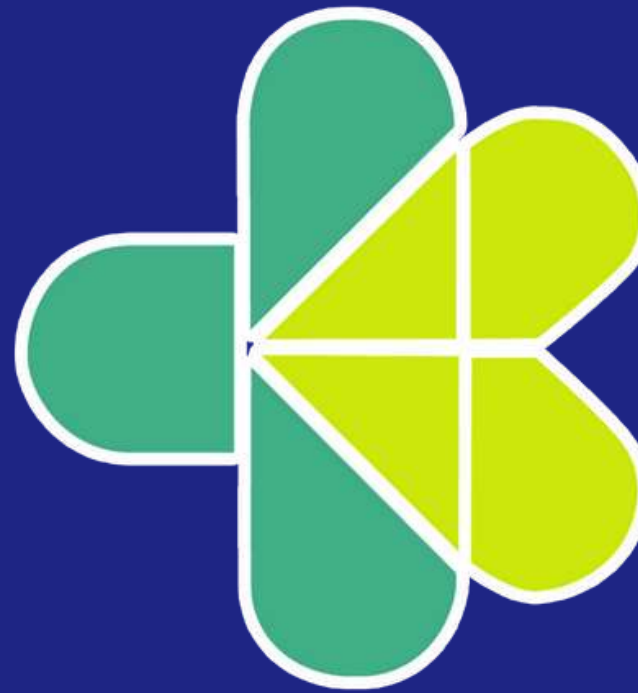
Komitmen Melaksanakan IHR diperkuat dengan GHSA

5 kasus berikut : **penyakit cacar, poliomyelitis karena virus polio liar, influenza pada manusia yang disebabkan oleh sub-tipe virus baru,** Severe acute respiratory syndrome (SARS), Covid-19 dianggap tidak lazim atau tidak terduga serta dapat memiliki dampak kesehatan masyarakat yang serius. Oleh karena itu, 5 kasus tersebut **wajib dilaporkan kepada WHO dalam waktu 24 jam**





World Health
Organization



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Yang berwenang untuk
memutuskan apakah satu
peristiwa termasuk KKM-MD
adalah Direktorat Jenderal WHO

Menentukan KKM-MD untuk
dilaporkan ke WHO.
Untuk saat ini IHR Focal point
untuk Indonesia dari Ditjen P2P



Kapasitas apa yang perlu dimiliki negara?

Kegiatan Surveilans dan Respons pada Otoritas Kesehatan Masyarakat

Tujuan: mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan respons terhadap penyebaran penyakit lintas negara dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dalam lingkup risiko kesehatan masyarakat yang dihadapi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional

KAPASITAS INTI APA YANG PERLU DIMILIKI NEGARA?

Surveilans dan Respons pada Otoritas Kesehatan Masyarakat

01

Lokal

Masyarakat, bidan desa,
Puskesmas, klinik

02

Menengah

Dinas Kesehatan Provinsi,
Kabupaten/kota

03

Nasional

Kementerian Kesehatan

Surveilans dan Respons di Pintu masuk negara yang telah ditentukan

Bandara, pelabuhan, dan titik perbatasan lainnya

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019

Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia

INTRUKSI PRESIDEN

2 MENKO

13 MENTERI
TEKNIS

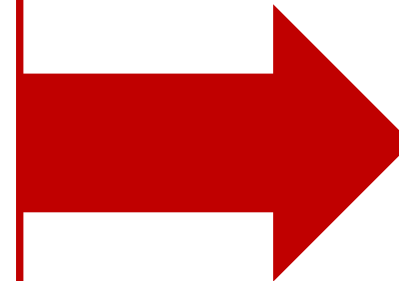
PANGLIMA
TNI

KA POLRI

4 KEPALA BADAN

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA



KOORDINASI

RENCANA DAN
ANGGARAN

EVALUASI DAN
PENYEMPURNAAN
KEMAMPUAN ANGGARAN

PENGUATAN
KAPASITAS
TEKNIS

1. PREVENT
2. DETECT
3. RESPONSE

INTEGRASI
SISTEM

MEKANISME
DARURAT

KERJASAMA: SWASTA,
PAKAR/ AKADEMISI, ORGANISASI
INTERNASIONAL, PROFESI

Kerangka Strategi

- Peningkatan kemampuan deteksi dini, verifikasi, investigasi, notifikasi, dan respon
- Penguatan koordinasi dan jejaring kerja

Pengembangan sistem

Penguatan Sumber Daya

Penguatan Jejaring

Penguatan Peraturan

Sustainability

- ✓ Pencegahan KLB, KKMMMD
- ✓ Pencegahan Perluasan KLB, KKMMMD

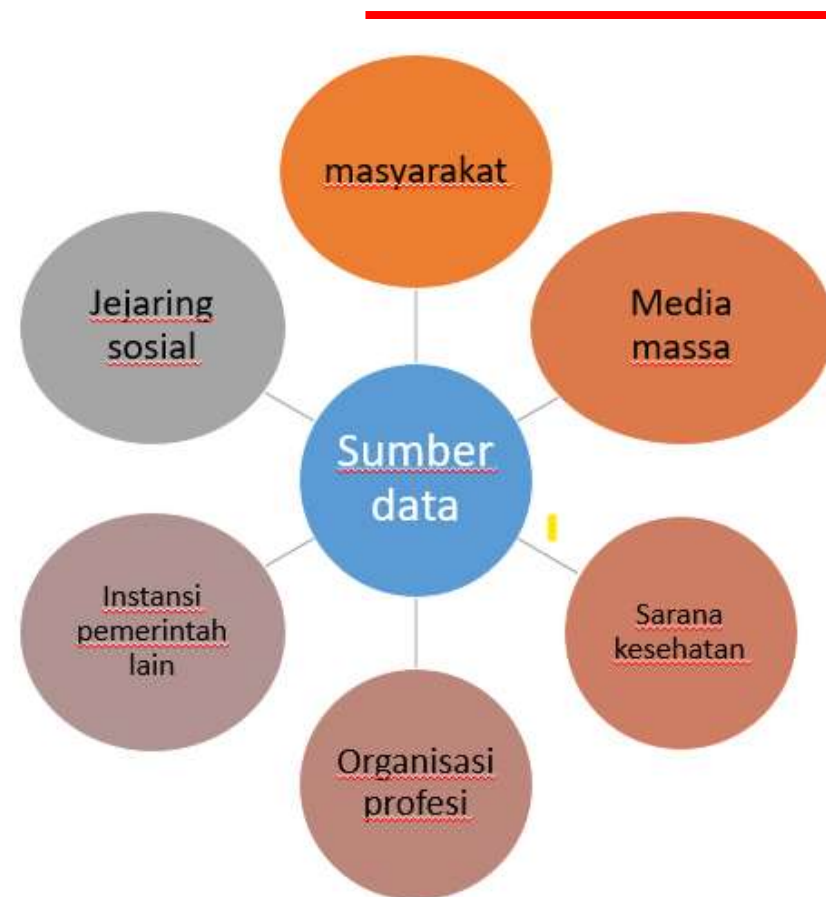
- Jml Kasus minimal
- Jml Kematian minimal
- Daerah terjangkau minimal

- Tanggung jawab:
- ✓ Pemerintah Pusat
 - ✓ Pemerintah Provinsi
 - ✓ Pemerintah Kab/Kota
 - ✓ Masyarakat

STATUS KESMAS MENINGKAT

Kerangka surveilans epidemiologi

Event-based surveillance



Indicator-based surveillance

Report
Ditangkap
Filter
Verifikasi

Data
Kumpulkan
Analisis
Interpretasi

Signal

Asesment
Public health alert
Investigasi
Control measures

Jejaring surveilans laboratorium

Kab/Kota
Provinsi
RS

WHO

Diseminasi



Memperkuat kapasitas inti



Provinsi, kabupaten/kota

- Meningkatkan kapasitas untuk EWARS dan Event-based surveilans di tingkat provinsi (34 provinsi.)
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam deteksi dan laporan di provinsi, dan kabupaten/kota
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen di provinsi dan kabupaten/kota



Rumah Sakit, Laboratorium

- Meningkatkan kapasitas untuk EWARS di laboratorium dan rumah sakit

Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa di Indonesia

01	UU 4/1984	Wabah penyakit menular, definisi serta hal-hal yang perlu dilakukan terkait peristiwa wabah penyakit menular.
02	UU 36/2009	Kewajiban dan wewenang pemerintah dalam menetapkan dan mengumumkan penyakit-penyakit yang berpotensi menular
03	UU 6/2018	Kekarantina kesehatan: definisi, kegiatan, dan wewenang pemerintah serta pihak-pihak yang terkait
04	Permenkes 949/2004	Definisi operasional, unit-unit yang terlibat , dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit terkait SKD-KLB.
05	Permenkes 45/2014	Dasar dari pelaksanaan surveilans kesehatan dan respons

PERAN MASING-MASING PIHAK DALAM SKD KLB

(Permenkes 949/2004)



1

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan KLB

2

Kajian epidemiologi ancaman

3

Peringatan kewaspadaan dini

4

Advokasi dan asistensi SKD-KLB

5

Penetapan peraturan, pengembangan teknologi, SKD darurat

Masyarakat, klinik

Puskesmas, RS, Lab

Dinkes Provinsi / Kabupaten / Kota

MASYARAKAT

Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan pemantauan perubahan kondisi rentan KLB
- 2) Peningkatan pemantauan perkembangan penyakit berpotensi KLB, dan melaporkan dugaan KLB ke Dinkes Kabupaten/Kota atau Puskesmas setempat
- 3) Melaksanakan penyuluhan kewaspadaan KLB di masyarakat
- 4) Kesiapsiagaan menghadapi KLB, terutama identifikasi penderita, pengenalan tatalaksana kasus dan rujukan, pencegahan dan perbaikan kondisi rentan

KLINIK

Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Pemantauan perkembangan penyakit berpotensi KLB dari pasien, serta melaporkan adanya dugaan KLB ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Puskesmas setempat
- 2) Melaksanakan penyuluhan dan mendorong kewaspadaan KLB di Klinik dan masyarakat.
- 3) Menyiapkan tenaga, obat-obatan, laboratorium, tempat perawatan

LOKAL

LABORATORIUM

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeriksaan laboratorium penyakit berpotensi KLB
- 2) Melakukan kajian epidemiologi kontinum penyakit berpotensi KLB berdasarkan pemeriksaan laboratorium

Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Sesegera mungkin memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada Dinkes Kabupaten/Kota dan unit terkait

Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan surveilans dan penyelidikan lebih luas untuk deteksi dini KLB di laboratorium dengan melaksanakan pemantauan wilayah setempat
- 2) Penyelidikan lebih luas terhadap dugaan KLB di lingkungan laboratorium
- 3) Penyuluhan dan mendorong kewaspadaan KLB di laboratorium

RUMAH SAKIT

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

- 1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi di Rumah Sakit
- 2) Melakukan kajian epidemiologi kontinum di lingkup Rumah Sakit
- 3) Melakukan kajian kemampuan RS dalam melaksanakan SKD-KLB dan penanggulangan KLB

Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Sesegera mungkin memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada unit terkait di lingkungan RS, melaporkan ke Dinkes Kabupaten/Kota

Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan surveilans untuk deteksi dini KLB dengan pemantauan wilayah setempat berpotensi KLB di lingkup RS
- 3) Penyelidikan lebih luas
- 4) Penyuluhan dan mendorong kewaspadaan KLB pada petugas dan pengunjung RS serta mendorong kewaspadaan KLB di RS
- 5) Penyiapan tim penyelidikan dan penanggulangan KLB di RS yang merupakan bagian dari tim KLB di Kabupaten/Kota

PUSKESMAS

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

- 1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi di wilayah Puskesmas
- 2) Melakukan kajian epidemiologi kontinum di wilayah Puskesmas
- 3) Penyelidikan lebih luas

Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Sesegara mungkin memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada program terkait dan linsek di lingkungan Puskesmas, termasuk RS, klinik, masyarakat, dan melaporkan ke Dinkes Kabupaten/Kota

Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan surveilans dan penyelidikan lebih luas untuk kondisi rentan KLB di wilayah Puskesmas
- 2) Peningkatan surveilans untuk deteksi dini KLB dengan pemantauan wilayah setempat berpotensi KLB di puskesmas dan pustu
- 3) Penyelidikan lebih luas
- 4) Penyuluhan dan mendorong kewaspadaan KLB di Pustu, RS, Klinik, Masyarakat
- 5) Penyiapan tim penyelidikan dan penanggulangan KLB Puskesmas yang merupakan bagian dari tim KLB di

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

- 1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota
- 2) Melakukan kajian epidemiologi kontinum di wilayah kabupaten/kota atau Puskesmas
- 3) Penyelidikan lebih luas

Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

- 1) Menginformasikan perkembangan penyakit berpotensi KLB dan ancaman KLB ke linsek provinsi dan Dinkes kabupaten/kota secara periodik dan jangka panjang
- 2) Memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB sesegera mungkin ke pihak-pihak terkait di kabupaten/kota, dinkes provinsi, dinkes kabupaten/kota yang berbatasan, dan masyarakat

Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan surveilans dan penyelidikan lebih luas untuk kondisi rentan KLB, KLB atau dugaan KLB di Kabupaten/kota
- 2) Mendorong kewaspadaan dan kesiapsiagaan di Kabupaten/kota
- 3) Penyelidikan lebih luas
- 4) Mendorong kewaspadaan, kesiapsiagaan dan pencegahan KLB di Unit Pelayanan Kesehatan dan masyarakat
- 5) Penyiapan tim penyelidikan dan penanggulangan KLB kabupaten/kota, suplai dan logistik, komunikasi dan pedoman
- 6) Kemitraan lintas sektor di kabupaten/kota

Advokasi dan asistensi penyelenggaraan SKD-KLB

- 1) Mengupayakan dukungan kebijakan dan anggaran di kabupaten/kota
- 2) Pembinaan dan bimbingan teknis untuk Unit Pelayanan Kesehatan
- 3) Menyusun peraturan dan pedoman SKD-KLB dan penanggulangan KLB di kabupaten/kota

DINAS KESEHATAN PROVINSI

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

- 1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi bekerjasama dengan Kemenkes dan Dinkes Kabupaten/Kota
- 2) Melakukan kajian epidemiologi kontinum di wilayah provinsi
- 3) Penyelidikan lebih luas

Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

- 1) Menginformasikan perkembangan penyakit berpotensi KLB dan ancaman KLB ke linsek provinsi dan Dinkes kabupaten/kota secara perodik dan jangka panjang
- 2) Memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB sesegera mungkin ke unit terkait wilayah provinsi serta dinkes provinsi yang berbatasan dan Kemenkes

Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan surveilans dan penyelidikan lebih luas untuk kondisi rentan KLB, KLB atau dugaan KLB di provinsi
- 2) Mendorong kewaspadaan dan kesiapsiagaan di Kabupaten/kota
- 3) Penyiapan tim penyelidikan dan penanggulangan KLB nasional, penyiapan suplai, logistik, komunikasi, dan pedoman
- 4) Kemitraan lintas sektor provinsi

Advokasi dan asistensi penyelenggaraan SKD-KLB

- 1) Mengupayakan dukungan kebijakan dan anggaran di provinsi
- 2) Pembinaan dan bimbingan teknis untuk Kabupaten/Kota
- 3) Menyusun peraturan dan pedoman SKD-KLB dan penanggulangan KLB di provinsi

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

- 1) Jejaring pengumpulan, pengolahan data dan informasi bekerjasama dengan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/kota dan lembaga lainnya
- 2) Melakukan kajian epidemiologi kontinum di wilayah nasional
- 3) Penyelidikan lebih luas

Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

- 1) Menginformasikan perkembangan penyakit berpotensi KLB dan ancaman KLB secara periodik ke linsek nasional
- 2) Memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB sesegera mungkin
- 3) Menginformasikan perkembangan penyakit jangka panjang

Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap KLB

- 1) Peningkatan surveilans dan penyelidikan lebih luas untuk kondisi rentan KLB, KLB atau dugaan KLB
- 2) Mendorong kewaspadaan dan kesiapsiagaan di Provinsi
- 3) Penyiapan tim penyelidikan dan penanggulangan KLB nasional, penyiapan suplai, logistik, komunikasi, dan pedoman
- 4) Kemitraan linsek nasional

Advokasi dan asistensi penyelenggaraan SKD-KLB

- 1) Mengupayakan dukungan kebijakan dan anggaran secara nasional
- 2) Pembinaan dan bimbingan teknis untuk Provinsi

Pengembangan teknologi SKD-KLB

- 1) Penelitian dan pengembangan teknologi SKD-KLB dan penanggulangan KLB
- 2) Pengembangan teknologi diagnostik

Menyusun peraturan perundangan

- Menyusun pedoman SKD-KLB dan penanggulangan KLB penyakit berpotensi KLB nasional

Pengembangan SKD-KLB darurat



Rangkuman

- **Memperkuat SKD-KLB nasional dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas inti sistem surveilans nasional dan global.**
- **Semua pihak, mulai dari lokal (masyarakat), fasilitas Kesehatan milik pemerintah (Puskesmas, RSUD, Labkesda, RSUP) maupun swasta (klinik, RS swasta, lab swasta), memiliki peran dalam mendeteksi dini potensi adanya kejadian luar biasa**